

RENCANA AKSI
PROGRAM *INTERNSHIP* PEMERINTAH DAERAH KE
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
TAHUN 2018

I. PROGRAM

Nama Program : Program Internship Pemerintah Daerah ke Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Batch I Tahun 2018
Tanggal Program : 23 Juli – 10 Agustus 2018
Lokasi Program : Gdg. Radius Prawiro, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Jln. Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta Pusat

II. PESERTA PROGRAM

Nama : T.R. Hadi Ichsan, SE, M.Si
NIP : 19750913 200604 1 013
Pangkat/Golongan : Penata Tk.1 (III/d)
Jabatan : Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah
Unit Kerja : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Pemerintah Daerah : Kabupaten Aceh Besar

III. ATASAN PESERTA PROGRAM

Nama : Arifin, S,Hi, M.Si
NIP : 197701042000121004
Pangkat/Golongan : Pembina IV/a
Jabatan : Plt. Kepala Badan
Unit Kerja : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

IV. MENTOR PROGRAM

Nama : Slamet Riyadi
NIP : 197410121995111001
Pangkat/Golongan : Penata, III/c
Jabatan : Fungsional AKPD
Unit Kerja : Direktorat Pembiayaan dan Transfer Non Dana Perimbangan

Nama : Irfan Sofi
NIP : 198103312001121001
Pangkat/Golongan : Penata, III/c
Jabatan : Fungsional AKPD
Unit Kerja : Direktorat Pembiayaan dan Transfer Non Dana Perimbangan

Apakah Anda mengimplementasikan Rencana Aksi ini sendiri atau berkelompok?

sendiri

berkelompok (*silakan tulis nama anggota kelompok dalam tabel di bawah ini*)

Gambarkan suatu situasi atau isu dalam institusi/organisasi/lingkungan kerja Anda yang mungkin dapat Anda ubah atau tingkatkan dengan mengimplementasikan sebuah Rencana Aksi!

Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Besar dalam pelaksanaan otonomi daerah masih sangat lemah ditandai dengan rendahnya Pendapatan Asli Daerah dalam membiayai Anggaran Pendapatan Asli Daerah (APBD), hal ini disebabkan:

- a. Upaya Pengumpulan Pendapatan Asli Daerah (Tax Effort) masih rendah;
- b. Kurangnya tenaga aparatur fiskus di Bidang Pendapatan Asli Daerah;
- c. Kurangnya pengetahuan petugas fiskus;
- d. Kurangnya kesadaran Wajib Pajak;
- e. Belum diterapkannya sanksi perpajakan terhadap Wajib Pajak;
- f. Kurangnya koordinasi dengan instansi terkait dan Instansi Vertikal;
- g. Belum maksimalnya intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah, dan NJOP PBB yang masih sangat rendah.

1. Apakah judul Rencana Aksi Anda?

PEMUTAKHIRAN DATA WAJIB PAJAK DAERAH DALAM RANGKA OPTIMALISASI PENERIMAAN PAD

2. Apakah manfaat/hasil dari Rencana Aksi Anda tersebut?

- a. Terdatanya Wajib Pajak aktif/tidak aktif dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar;
- b. Terintegrasinya Data Wajib Pajak Pada Bidang Pendapatan Asli Daerah dengan Data Wajib Pajak pada Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP);
- c. Proses pendataan dan pelaporan dapat dilakukan lebih cepat dan efektif dengan Penggunaan Aplikasi Pendapatan Asli Daerah guna mendukung transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah serta kenyamanan dan kemudahan bagi Wajib Pajak;
- d. Dengan Pemutakhiran data diharapkan:
 - 1) Nilai NJOP mendekati harga pasar;
 - 2) Memberikan penilaian yang adil, benar dan transparan;
 - 3) Meningkatkan akurasi dasar pengenaan pajak daerah dari setiap jenis pajak;
 - 4) Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah;

3. Uraikan bagaimana Rencana Aksi Anda memenuhi kriteria SMART!

<p>Specific Spesifik</p>	<p><i>Aktifitas spesifik apa yang akan Anda lakukan dalam melaksanakan Rencana Aksi?</i></p> <p>Jangka Pendek</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemutakhiran Data Wajib Pajak dengan Melakukan kerjasama: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Aceh Besar dalam Pendataan Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Penyesuaian NJOP dengan ZNT; 2. Kejaksaan Aceh Besar tentang Penagihan Pajak Daerah yang terutang; 3. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Banda Aceh dalam pertukaran data Wajib Pajak non PBB-P2; • Meningkatkan kemampuan tenaga fiskus dengan diklat/pelatihan. • Membuat Aplikasi/software Pendapatan Asli Daerah. <p>Jangka Panjang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan Kegiatan Penilaian Objek Pajak tertentu; • Meningkatkan kemampuan tenaga fiskus dengan diklat/pelatihan dan menambah tenaga fiskus baru yang berkompeten dibidang Pendapatan Asli Daerah; • Membuat Aplikasi/software Pendapatan Asli Daerah yang berbasis Website;
<p>Measurable Dapat diukur</p>	<p><i>Bagaimana Anda mengukur keberhasilan Rencana Aksi? Berapa orang yang terlibat? Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Berapa banyak yang diproduksi? Berapa persentase perubahan yang dicapai?</i></p> <p>Jangka Pendek</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adanya Perjanjian kerjasama dengan Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Aceh Besar; • Adanya Perjanjian Kerjasama dengan Kejari Aceh Besar perihal Penagihan Pajak Daerah yang terutang; • Adanya perjanjian kerjasama dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Banda Aceh; • Tersusunnya Rancangan penyesuaian NJOP dengan ZNT Pajak Bumi Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan (PBB-P2); • Adanya Apilkasi/Software Pendapatan Asli Daerah; • Yang terlibat sebanyak 15 Pegawai di bidang Pendapatan (Nama Terlampir); • Waktu yang dibutuhkan 3-5 Bulan.

	<p>Jangka Panjang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adanya Aplikasi/Software yang berbasis website Pendapatan Asli Daerah untuk mendukung pelayanan terhadap Wajib Pajak; • Tersusunnya draft rancangan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Pajak Daerah; • Terbentuknya Tim Penilaian Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2); • Melakukan Pendataan Pajak Daerah dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar.
<p>Achievable Dapat dicapai</p>	<p><i>Apakah alasan Anda, mengapa Anda sangat yakin bahwa Rencana Aksi tersebut dapat diimplementasikan?</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Kepala Daerah Kabupaten Aceh Besar berkomitmen dan mendukung terhadap perbaikan tata kelola pemerintahan kearah yang lebih baik; • Adanya motivasi dari aparatur fiskus Bidang Pendapatan Asli Daerah untuk meningkatkat PAD dari tahun-tahun sebelumnya; • Adanya dukungan dari Instansi Vertikal dan OPD dalam melaksanakan program aksi ini; • Adanya dukungan dari Sekretaris Daerah maupun Kepala Badan secara langsung untuk program peningkatan PAD sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan Qanun Daerah yang berlaku;
<p>Relevant Relevan</p>	<p><i>Bagaimana relevansi Rencana Aksi Anda terhadap: (a) institusi/ organisasi/ lingkungan kerja Anda (b) tugas pokok dan wewenang Anda, dan (c) program ini?</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Sesuai dengan dengan Rencana Kerja dan Rencana Stategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Besar; • Tersedia anggaran untuk melakukan rencana aksi; • Mendukung capaian kinerja pemilik rencana aksi karena masih dalam lingkup wewenang yang dimiliki; • Adanya dukungan atasan dalam melaksanakan aksi ini; • Adanya dukungan OPD dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan peningkatan pelayanan publik

Timely Rentang/ketepatan waktu	<i>Mengapa waktu yang Anda tetapkan tersebut adalah waktu yang tepat untuk melaksanakan Rencana Aksi?</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • Semakin cepat rencana aksi ini dijalankan akan semakin baik bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Besar khususnya bagi BPKD Kabupaten Aceh Besar dalam mencapai target lebih cepat sebelum akhir desember 2018; • Untuk Rencana Aksi Jangka Pendek direncanakan akan dilaksanakan dalam tahun anggaran 2018; • Untuk Rencana Aksi Jangka Panjang direncanakan akan dilaksanakan dalam tahun 2019

4. Gunakan format berikut ini untuk menunjukkan:
- a. Kegiatan-kegiatan yang akan Anda laksanakan; dan
 - b. Kapan Anda akan memulai dan mengakhiri kegiatan-kegiatan tersebut.
(Jika Rencana Aksi berkelompok tuliskan kependekan nama anggota kelompok yang bertanggung jawab untuk setiap kegiatan)

Lihat Lampiran

5. Sumber daya apa yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan Rencana Aksi Anda, dan bagaimana Anda mendapatkan sumberdaya tersebut?
1. Meminta Pertimbangan TAPD untuk tersedianya anggaran aksi baik Sarana dan Prasarana termasuk sistem aplikasi, pelatihan, pemeliharaan;
 2. Tersedianya narasumber untuk pelatihan/diklat perpajakan;
 3. Penempatan minimal 3 orang PNS dan 2 orang Pegawai Pemerintah dengan perjanjian Kerja (PPPK)
 4. Sumber Daya Manusia sesuai dengan kapasitas dan kompetensi.
-
6. Identifikasi kemungkinan hambatan dalam mengimplementasikan Rencana Aksi Anda? Bagaimana cara Anda menanggulangnya?
1. Penolakan dari PPAT dalam penyesuaian NJOP sesuai ZNT;
 2. Tidak adanya tenaga penilai Objek PBB-P2;
 3. Keterbatasan anggaran pada akhir tahun;
7. Bagaimana Rencana Aksi Anda dapat meningkatkan pemerintahan yang baik (*good governance*), kesadaran gender (*gender awareness*), dan manajemen perubahan (*change management*)?

Pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>)	: Rencana aksi mendukung visi dan misi Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Aceh Besar terhadap terwujudnya Aceh Besar yang maju, sejahtera, dan bermartabat dalam syariat Islam dan terwujudnya Pemerintahan yang bersih (Clean Governance). Peranan stakeholder dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah sektor Pajak Daerah sangat penting sehingga akan mempercepat capaian dari program rencana aksi. Transparansi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dengan adanya Aplikasi mendukung.
Kesadaran Gender (<i>gender awareness</i>)	: Pengembangan Sumber Daya Manusia tidak dibatasi oleh gender/jenis kelamin, suku, maupun agama, semua mempunyai kesempatan yang sama untuk maju dan berkembang.
Managemen Perubahan (<i>change management</i>)	: Terbentuknya sumberdaya manusia yang handal/ aparaturnya fiskus yang berkompetensi dan bertanggungjawab akan berdampak terhadap pelayanan dan peningkatan Pajak Daerah di Kabupaten Aceh Besar